

Judul : WPF SDGs harus jadi momentum untuk selesaikan krisis Rohingya
Tanggal : Kamis, 07 September 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

WPF SDGs Harus Jadi Momentum untuk Selesaikan Krisis Rohingya



PEMBUKAAN KONFERENSI. Ketua DPR Setya Novanto di dampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Fadli Jon, Fahri Hamzah dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf membuka konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu, (06/09).

JAKARTA — DPR RI meminta agar pertemuan Konferensi World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals menjadi momentum untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya di Wilayah Rakhine, Myanmar. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, menegaskan, menyelamatkan masa depan etnis Rohingya adalah bagian dari konsolidasi demokrasi. Sebab, yang terjadi di Rohingya adalah masalah multikultur di mana seharusnya kaum minoritas dilindungi hak-haknya.

Dia menilai, terjadi kegagalan dalam mengelola perbedaan antar etnis hingga muncul diskriminasi dan kekerasan etnis di Rohingya yang berbahaya bagi demokrasi di Myanmar. "Kita melihat dan ada penyelidikan awal bahwa militer Myanmar terlibat dalam kekerasan bersejarah, di mana mereka secara komando dan terorganisasi menyisir penduduk melakukan kekerasan, membunuh dan mengusir ratusan ribu penduduk. Kalau informasi ini benar, maka masalah Myanmar bukan lagi masalah biasa, tapi bentuk kejahatan kemanusiaan," ujar dia di sela-sela *World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs)* di Nusa Dua, Bali, Rabu (06/09).

Fahri menambahkan, jika hal itu terbukti maka Myanmar bisa diberi sanksi oleh ASEAN dan dunia. Bahkan bisa diseret ke Mahkamah Internasional atas pelanggaran HAM. Dia pun mendorong parlemen yang hadir dalam kesempatan ini untuk melakukan inisiasi bersama guna menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar. Yaitu dengan menggelar pertemuan antara delegasi Indonesia, Turki, dan Bangladesh.

"Ada Bangladesh, negara tetangga Myanmar yang hingga hari ini masih enggan membuka perbatasannya menampung pengungsi Rohingya. Dan ada delegasi dari Turki di mana negara tersebut yang terlihat paling menonjol dalam menginisiasi bantuan kemanusiaan di Rohingya. Termasuk melakukan ancaman dan tekanan politik dan militer ke Myanmar. Sayangnya, parlemen Myanmar tak hadir dalam pertemuan parlemen dunia yang sedang berlangsung," jelas politikus PKS itu.

"Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas. Dan parlemen RI memang sudah mengambil sikap tegas. Kita berharap, parlemen dunia yang sedang berkumpul ini, bisa membantu secara politik dan kemanusiaan. Demikemungkinan dan persaudaraan warga dunia, mari kita bantu," seru Fahri.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, menurutnya, konflik maupun kekerasan yang terjadi di masyarakat di belahan dunia harus diakhiri. Seperti yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Novanto pun meminta pemerintah Myanmar segera memulihkan stabilitas dan memberikan perlindungan keamanan secara inklusif terhadap seluruh masyarakat di Rakhine sebagai bagian dari pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian dan tidak akan ada perdamaian tanpa adanya pembangunan berkelanjutan.

SGDs Bali

DPR RI menyelenggarakan Konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* (Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Perhelatan yang dibuka oleh Ketua DPR RI dan diselenggarakan sejak 6-7 September itu dihadiri oleh 285 delegasi dari 47 parlemen dari berbagai negara. Antara lain, Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. Hadir juga 19 *observer*, antara lain ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA), UNDP, European Union, dan *Migrant Care*.

Konferensi ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran diplomasi parlemen," ungkap Novanto saat membuka *World Parliamentary Forum* tersebut.

Dengan mengangkat tema "*Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development*",

forum ini membahas perencanaan peran parlemen di berbagai negara dalam menyelesaikan Agenda Pembangunan 2030 dengan tujuan penting mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.

Novanto menyerukan agar parlemen dunia aktif dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ia berharap, forum ini memberikan inspirasi bagi Parlemen Dunia agar mampu mengintegrasikan tindakan terkait perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.

"Satu yang perlu diperhatikan, penanganan perubahan iklim hendaknya mencerminkan keseimbangan dan keadilan, serta tidak menghambat pembangunan negara berkembang," papar Novanto. Dia menambahkan, ada begitu banyak tantangan kesuksesan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, salah satunya kemiskinan. Karenanya, diharapkan forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan.

Di samping itu, konflik maupun aksi kekerasan dan terorisme juga menjadi tantangan yang dihadapi, karena dapat menghalangi kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh sebuah Negara. "Saya mendorong forum ini mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari ketakutan. Karena saya menyadari, Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian," jelasnya.

Novanto menambahkan, masih banyak tantangan kompleks yang dihadapi dalam pencapaian agenda 2030. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk parlemen, harus menjalin komitmen kolaboratif untuk melaksanakan rencana aksi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

"Saya yakin forum ini akan berjalan produktif, lancar, dan sukses. Sehingga dapat memperkuat peran parlemen dan membangun sinergitas serta keterlibatan seluruh pihak dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030," papar Novanto dilanjutkan dengan pemukulan Gong tanda dibukanya Forum Parlemen Dunia. ● ril